KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kinerja BAKN Tidak Bergigi
Tanggal : Selasa, 30 Oktober 2012
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Kinerja BAKN Tidak Bergigi

BADAN Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dinilai tidak bergigi. Alat kelengkapan DPR yang dipimpin Sumarjati Arjoso tidak efektif. Banyak kasus-kasus keuangan negara yang berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) idak ditindaklanjuti.

Menurut Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar, sampai saat ini belum ada kasus-kasus hasil audit BPK yang ditangani BAKN. Padahal, sebut dia, BPK selalu mengungkapkan adanya kehilangan uang negara hingga triliunan rupiah.

"Kan BPK itu selalu wacana saja. Nah, BAKN itu sebenarnya untuk menuntaskan wacana itu, tetapi tidak tuntas juga," jelas Harry, kemarin.

Harry menambahkan, kendala lainnya adalah BPK tidak pernah menyatakan secara langsung bahwa hasil auditnya soal adanya kerugian negara merupakan suatu temuan. BPK selalu berlindung tentang adanya kerugian negara sebatas "ada potensi" kerugian negara.

"Atau barangkali beberapa hal bisa ditindaklanjuti BAKN. Yang menjadi pertanyaan apakah BAKN menjadi badan untuk analisis atau apa. Atau mereka juga menjadi badan yang mempunyai kewenangan menindaklanjuti suatu perkara," cetusnya.

Meski kinerja BAKN tidak efektif, Harry tidak menyarankan pembubaran badan kelengkapan DPR tersebut. Pasalnya, pembubaran alat kelengkapan DPR harus juga merevisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pembubaran BAKN juga, kata dia, mengembalikan wajah DPR seperti periode 2004-2009.

"Apakah Anda mau seperti itu, kan juga kan ada kekecewaan mengenai keadaan itu," ujarnya.

Harry hanya menyarankan, struktur organisasi BAKN diubah. Kekurangan BAKN saat ini, sebut dia, karena badan tersebut tidak memiliki staf ahli yang benar-benar serius.

"Staf-staf yang ada sekarang ini cuma administratif. Misalnya, mengurusi perjalan dan pertemuan. Tapi untuk menganalisis kasus-kasus itukan diperlukan staf ahli," tandasnya. ■ MLF